REFORMASI GEREJA DAN HAM

BERNARD T. ADENEY-RISAKOTTA, PH.D.

I. Cerita tentang Hak Asasi Harimau dan Hak Asasi Ayam (HAH dan HAA)

Pada suatu hari seekor ayam merah terbang ke atas tumpukan beras untuk mencari makan. Dari kejauhan ia melihat seekor harimau kuning keluar dari hutan dan berjalan ke arahnya. Harimau menghampiri ayam itu dan menyapa si ayam dengan sangat sopan. Katanya,

"Selamat pagi ibu ayam. Mau ke mana engkau?"

"Ng ..., nggak ke mana-mana, cuma mencari makan," jawab ayam betina.

"Ibu sehat?"

"Ya, baik-baik saja," sahut ayam cepat

"Ibu tampak begitu segar dan cerah pagi ini?"

"Ng ...," jawab si ayam yang mulai mencurigai keramahan harimau.

Sambil bicara basa-basi harimau pintar itu memperhatikan tubuh ayam itu. Ia yakin tubuh ayam itu gemuk dan pasti dagingnya empuk dan lezat untuk dimakan. Sayang, dia terlalu jauh di atas tumpukan beras dan tidak bisa ditangkap. Namun, dasar harimau lapar, ia bicara lagi.

"Cukup hebat reformasi pembangunan sekarang ini, kan? Bagaimana pendapat ibu?"

"Reformasi? Saya nggak tahu. Reformasi yang mana?" jawab ayam.

"Yah, banyak sekali reformasi di kalangan pemerintah kita. Sekarang KKN tidak disetujui lagi dan dosa-dosa dari Orde Baru sudah berlalu. Bahkan, Indonesia sudah meratifikasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Binatang (HAB). Kita sekarang semua mempunyai hak-hak mutlak dan tidak bisa diganggu oleh siapa pun. Pemerintah sudah setuju, kalau ada binatang yang melanggar HAB dia akan ditindak dengan

tegas!" katanya dengan sungguh-sungguh. Ibu ayam sedikit bingung dan bertanya,

"Apa itu HAB?"

"Oh...," jawab harimau yang pernah belajar di luar negeri itu, "ada tiga macam. Pertama, HAB yang negatif, yaitu seekor binatang tidak boleh dibunuh, ditangkap, dan dimasukan dalam kandang; disiksa dalam eksperimen; dimakan; dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, HAB yang positif, yaitu seekor binatang mempunyai hak atas kebutuhan mendasar untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain."

"Baik sekali," kata ibu ayam sambil masih bersusah-payah mencari makan. Tetapi dia juga bertanya-tanya dalam hatinya, makanan seperti apa yang menjadi hak makanan harimau?

"Dan yang ketiga," ujar harimau, "merupakan HAB sipil dan politik seperti kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, berpendapat, kebebasan pers, hak untuk bersuara dan partisipasi politik, dan lain-lain."

Ibu Ayam merasa sudah pernah mendengar hal seperti ini dalam ceramah di televisi dan kursus P4, jadi dia bertanya,

"Bukankah semua hal seperti itu sudah tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila?"

"Memang, itu benar," jawab harimau tegas, "tetapi pada masa lampau ada penyimpangan sedikit dalam Orde Baru. Sekarang dengan reformasi kita sudah kembali kepada jalan benar. Sekarang hak asasi setiap binatang dijamin oleh pemerintah dan ABRI. Kita semua aman. Ayo, turun dari tumpukan beras ini, kita makan bersama-sama dan berdiskusi tentang partai politik mana yang paling cocok. Keamanan dijamin oleh HAB. Tidak ada yang menganggu. Turunlah ibu. Ikutilah reformasi!"

Akan tetapi, walaupun ibu ayam itu sederhana dan tak berpendidikan tinggi, dia tidak bodoh. Dia tidak turun seperti dikatakan harimau. Ia hanya berpura-pura memandang jauh seperti melihat sesuatu yang mengagetkannya. Harimau itu merasa sedikit tersinggung dan bertanya,

"Mengapa ibu ayam menerawang jauh? Apa yang sedang dipandang?"

"Oh, nggak apa-apa," jawab ayam itu.

"Sekarang HAB sudah terjamin, kan? Cuma, mengapa ada rombongan manusia yang berpakaian hitam dan membawa senjata api berjalan cepat ke sini?"

"Waduh! Ninja! Ninja!" harimau berteriak-teriak, sangat takut.

"Maaf, permisi dulu ibu. Saya sangat sibuk hari ini!"

"Kokekok petok petok...," ibu ayam berkotek dan tertawa.

"Mengapa cepat-cepat? Aman, kan? Ada HAB, ada Pancasila, ada reformasi, ada demokrasi, ada hukum, dan lain-lain. Mengapa takut ninja?"

Tetapi pak harimau tidak menjawab. Dia sudah melarikan diri menghilang dalam kepulan debu. Ibu ayam tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya tidak ada ninja, dan dia tahu bahwa harimau itu berbohong tentang HAB. Mungkin Hak Asasi Harimau (HAH), bertentangan dengan Hak Asasi Ayam (HAA), yang tidak bisa dijamin oleh HAB.[1]

II. Yang "Tebal" dan yang "Tipis"

Mungkinkah kita di Indonesia sudah agak bosan dengan ideologi dan kata-kata indah? Kata-kata indah seperti Pembangunan, Reformasi, Demokrasi, bahkan Hak Asasi Manusia sudah terlalu sering dirumuskan dan terlalu sedikit dilakukan. Pancasila sendiri mulai diragukan sebagai dasar negara. Dalam artikel ini saya mau mencoba membuktikan bahwa ideologi apa pun, termasuk HAM, tidak bisa menjadi dasar masyarakat yang adil. Sebaliknya, praktek-praktek yang manusiawi seharusnya menjadi dasar bagi abstraksi indah seperti HAM. Tidak ada negara di dunia ini di mana HAM bisa dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM. Tentu saja, ada negara-negara di mana HAM lebih atau kurang dihormati. Yang menentukan "kurang-lebih" itu bukan tanda tangan atas deklarasi tertentu, tetapi institusi-institusi, struktur-struktur, dan kebiasaan praktis dari hati masyarakat (habits of the heart).[2]

Pendekatan etika sosial yang lama mulai dengan prinsip-prinsip, seperti HAM, baru mencoba menerapkannya secara konteksual dalam budaya atau keadaan tertentu. Prinsipnya dilihat sebagai universal dan mutlak, penerapannya harus relatif sesuai dengan konteks nyata. Tetapi menurut pendapat saya, kita belum mengerti prinsip-prinsip apa pun sebelum dihayatinya dalam kenyataan lokal. Atau dengan kata lain, kita mulai dengan praktek-praktek nyata, baru mencoba memformulasikannya melalui konsep abstrak yang berbau universal. Yang universal bukan dasar untuk yang partikular, tetapi sebaliknya, praktek dan pengetahuan lokal merupakan dasar untuk abstraksi universal. Kalau harimau sudah terbiasa makan ayam, tidak mungkin HAB bisa melindungi ibu ayam. Baru sesudah harimau terbiasa makan tempe dan ikan, HAB bisa masuk akal. Baru masuk akal masih belum cukup bagi Ibu Ayam, kecuali ada institusi kuat yang bisa melindungi Ibu Ayam dan menghukum Bapak Harimau kalau dia melanggar HAB Ibu Ayam.

Pendekatan yang mirip ini dijelaskan oleh Michael Walzer dengan istilah etika "tebal" dan "tipis" ("thick" dan "thin").[3] Istilah ini dipinjam dari bidang antropologi di mana Clifford Geertz memperbandingkan teori abstrak dengan perilaku konkret dalam budaya lokal.[4] Yang teoretis dan abstrak (pengetahuan tipis), hanya berguna sejauh itu sesuai dengan struktur dan perilaku dalam budaya dan tempat tertentu (pengetahuan tebal). Hak Asasi Manusia merupakan etika tipis yang tergantung kepada praktek tebal. Praktek tebal itu tidak universal oleh karena berbeda dalam budaya dan tempat yang berbeda. Tetapi ada unsur yang kelihatan universal yang bisa diabstraksikan atau disederhanakan dari praktek tebal itu. Unsur universal tidak bisa menjadi dasar untuk praktek dalam konteks lain oleh karena abstraksi bukan dasar tetapi penyederhanaan dari praktek.

Misalnya, kita semua setuju bahwa perempuan mempunyai hak asasi manusia supaya tidak boleh diperkosa. Dasarnya dalam satu budaya adalah bahwa perempuan harus suci sebelum menikah dan kalau diperkosa, dia dipermalukan, sulit dinikahkan, mas kawin hilang dan hidupnya hancur. Dalam budaya lain, perempuan sering berhubungan intim sebelum nikah dan larangan perkosaan lebih berdasarkan isu kekerasaan yang menyakiti dan menghina hak perempuan atas tubuh sendiri. Dalam satu budaya istri tidak bisa diperkosa oleh suaminya oleh karena dia mempunyai hak atas tubuh istrinya. Tetapi dalam budaya lain, kalau istri dipaksa oleh suami, bisa dipenjarakan oleh karena dianggap memerkosa. Praktek HAM tebal dalam kedua negara, berbeda sekali, tapi mereka setuju dengan HAM tipis, yaitu larangan terhadap pemerkosaan.

Larangan bukan dasar untuk praktek tetapi abstraksi dari praktek yang mempunyai dasar dalam struktur sosial dan filsafat yang berbeda. Etika tipis seperti HAM merupakan semacam *lingua franca* atau bahasa umum yang berguna untuk berkomunikasi di antara budaya.[5] Tetapi tidak cukup mendalam untuk mengganti bahasa lokal atau menjelaskan praktek lokal. Mungkin harimau dan ayam setuju dengan HAB, termasuk bahwa binatang tidak boleh dibunuh. Tetapi harimau merasa ada kekecualian untuk harimau-harimau yang hampir punah dan harus makan daging, padahal ayam merasa telur pun seharusnya dilindungi.

III. Dasar Kuno HAM Modern

Ada perdebatan rumit tentang asal-muasal ide HAM yang modern. Ada sekularis yang menyatakan itu muncul dari biologi saja. Orang tidak

mau mati, tetapi mau hidup sejahtera. Tidak lebih rumit dari itu. Jadi, hak atas hidup, makanan, dan seks dilindungi untuk keamanan *homo sapien*. Tetapi ide ini sebenarnya jarang muncul dalam sejarah manusia. Jarang ada praktek sosial yang menjaminkan hidup sejahtera kepada semua orang sebagai kewajiban sosial bersama. Biasanya ada kelompok tertentu yang tidak menerima hak tertentu. Biasanya hak-hak yang berbeda diberikan kepada orang berdasarkan hal-hal seperti usia, kekuatan, kesehatan, status, kekayaan, ras, agama, keluarga, jabatan, pendidikan, kecantikan, dan kriteria lain.[6] Konsep paling dasar di belakang Hak Asasi Manusia yang hak-haknya mutlak untuk setiap orang secara merata, hanya oleh karena mereka manusia.

Tidak mungkin dipastikan dari mana asal HAM. Ada akar sangat kuno yang melatarbelakangi HAM. Setiap usaha untuk menjaga martabat manusia dan membatasi kekuasaan yang menindas orang lemah bisa dilihat sebagai latar belakang HAM. Alkitab sebenarnya penuh dengan cerita yang mendukung martabat manusia. Misalnya, dalam Keluaran, Yahweh mempedulikan sengsara orang Israel dan mengutus Musa untuk menuntut Firaun supaya budak Israel dibebaskan. Tuhan sendiri tidak setuju dengan penindasan kepada orang lemah.

Keadaan mereka sebagai budak tidak dilihat sebagai nasib atau hukum alam, tetapi sebagai kejahatan. Kalau Yahweh membebaskan Israel dari pelanggaran HAM, Yahweh juga menghukum Israel atas hal yang sama. Menurut Amos, setiap negara tetangga Israel akan dihukum oleh karena kekejaman dan ketidakmanusiaan terhadap suku lain. Lebih dari itu, Israel sendiri juga akan dihukum, "...oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut; mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara."[7] Yang luar biasa di sini, hukuman Allah tidak memandang bulu. Setiap negara yang menindas kaum miskin, termasuk Israel dan Yahudi, dihukum dari sumber transenden. Menurut firman melalui Amos, suku-suku apa pun dikasihi dan dihukum oleh Yahweh. Moralitas politik, dari pendekatan ini, tidak diciptakan oleh manusia, tetapi berasal dari Allah.

Dalam Perjanjian Baru, perilaku Yesus terhadap semua orang, termasuk kelas-kelas paling bawah dan terhina menceritakan martabat manusia yang sangat dihargai. Walaupun bahasa "hak" tidak dipakai, hormat yang disampaikan kepada pelacur, penyakit kusta, pencuri, dan semua orang miskin sangat menonjol. Etika sosial ini juga bisa dilihat dalam pikiran Paulus, yang memperjuangkan hormat yang sama terhadap orang non-Yahudi, budak, dan perempuan. Dalam Kristus tidak

ada perbedaan martabat berdasarkan ras/etnisitas, kelas sosial/ekonomi, atau kelamin.[8]

Walaupun baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru kaya sekali dengan cerita yang menilai tinggi martabat manusia, tidak ada konsep "hak" asasi manusia. Hak merupakan konsep modern yang terkait dengan pandangan modern terhadap seorang manusia sebagai satu pribadi yang patut dilindungi berdasarkan kemanusiaannya. Yang paling dekat dari dunia kuno adalah hak warga negara (citizen). Tetapi sebagian besar penduduk bukan warga negara. Hak kewarganegaraan hanya terbatas kepada laki-laki dari keluarga kelas atas. Namun, Athenagoras, theolog Kristen Yunani, pada tahun 177 A.D. menuntut Kaisar Romawi untuk tidak merampas dari orang Kristen hak-hak yang dinikmati oleh semua orang lain. Athenagoras pakai bahasa "hak yang setara" (equal rights), "hak bersama semua orang" (the common right of all), dan "keadilan yang setara" (equal justice).[9]

Namun, kecuali pada masa agama Kristen tertindas, pikiran tradisional Kristen lebih menekankan hak-hak raja yang diterima dari Allah daripada hak rakyat biasa. Raja mempunyai hak dan rakyat harus tunduk dan taat sesuai dengan Rm 13. Tetapi selalu ada orang yang kurang puas dengan pikiran seperti itu yang menyebabkan konsep "hak" muncul dan bertahan terutama dalam lingkungan orang yang tertindas. "Hak" dilahirkan dan bertahan dalam gerakan dari bawah, bukan lewat spekulasi dari atas saja. Menurut pendapat saya HAM modern merupakan salah satu buah dari Reformasi Gereja pada abad 16-17.

IV. Kelahiran HAM Modern pada Reformasi Abad 16-17 A.D.

Penafsiran ini tidak disetujui oleh semua orang. Misalnya, ada pendapat bahwa HAM muncul dari gerakan sekularisasi yang mencoba membangun hukum dan etika politik terlepas dari agama. Pencerahan liberal, khususnya Hobbes, Locke, Grotius dan Mills menjadi tokoh-tokoh kunci untuk HAM. HAM muncul dari konsekuensi akal budi, bukan dari teologi. Agama-agama terlalu sibuk, menghantam musuhnya dari sesama agama lain, untuk merumuskan HAM. Reformasi di Eropa menguatkan pemerintahan totaliter modern. Pikiran dominan dalam Gereja Katolik, Gereja Inggris, dan Gereja Lutheran pada abad 16-17, adalah bahwa hak ilahi raja mutlak dan kewajiban rakyat untuk patuh. Yang merumuskan HAM secara sistematis bukan teolog tetapi filsuf-filsuf Pencerahan Liberal, khususnya John Locke.

Walaupun memang begitu, menurut pendapat saya, HAM yang dirumuskan oleh filsuf-filsuf itu sudah dilahirkan dalam praktek-praktek

Gereja khususnya Gereja radikal di Swiss, Belanda, Inggris, Skotlandia, dan Amerika Serikat, yaitu gerakan Kalvinis yang bisa disebut "puritan" dan "bebas". Gerakan ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diatur dalam konstitusi. Puritan yang berbeda dari Gereja Katolik, Inggris, dan Lutheran terutama oleh karena mereka merupakan minoritas yang tertindas sedangkan Katolik, Gereja Inggris, dan Lutheran lebih sering berkuasa. Yang tertindas oleh pemerintah jauh lebih mungkin berpikir tentang hak-hak mereka dan bagaimana membatasi yang berkuasa. Lagi pula, pada tempat dan waktu di mana Gereja Katolik tertindas, seperti di Perancis dan Inggris, mereka melawan kerajaan protestan dan menekankan hak-haknya.[10]

Tradisi Konsiliar Katolik khususnya, sudah lama merumuskan konsep seperti hukum moral abadi (natural law), kedaulatan rakyat, kontrak pemerintahan dan hak resistensi terhadap ketidakadilan. Pemikir-pemikir seperti John dari Salisbury, St. Thomas Aquinas dan Marsiglio yang sudah akrab dengan filsafat Yunani-Romawi yang juga memberi dasar konseptual untuk HAM. Namun, pemikiran Katolik Konsiliar tentang HAM, yang cukup mendalam, tidak membuahkan institusi-institusi yang melindungi HAM dalam negara di mana Katolik menjadi agama negara. Pemikiran "imperial" masih dominan dalam kalangan baik Katolik maupun Protestan, yang masih bermimpi tentang kekaisaran berdasarkan agama.

Meskipun yang tertindas lebih mungkin memikir tentang HAM, tidak tentu mereka lebih demokratis. Tahun 1572, lebih dari 20.000 penganut Kristen Huguenot dibunuh oleh rakyat di Prancis. Huguenot Protestan Perancis menuntut hak hidup mereka kepada rajanya oleh karena mereka dibenci oleh sesama rakyat. Mereka tidak ditindas oleh pemerintah tetapi oleh rakyat agama lain. Edict dari Nantes, Raja Henry IV memberi perlindungan kepada Kristen Huguenot dan mereka menjadi pendukung kuat kepada kerajaan. HAM kaum Huguenot lebih diancam oleh "demokrasi" daripada kerajaan oleh karena mereka merupakan minoritas kecil. Dari cerita ini muncul pertanyaan bagi Gereja di Indonesia: apabila pemerintah menjadi lebih demokratis dan lebih dikuasai oleh kehendak rakyat, bagaimana agama atau kelompok minoritas bisa dilindungi dari penindasan oleh mayoritas? Cerita Huguenot tidak asing bagi suku Tionghoa di Indonesia, suku Serbs di Kroatia atau suku Albania di Serbia. Namun, penindasan dan kepedulian terhadap HAM biasanya berkaitan dengan resistensi dari pemerintahan yang menindas rakyat. Pikiran tentang HAM, baik dari Protestan maupun Katolik diinspirasikan oleh teori politik Yunani-Romawi serta pemikir-pemikir

abad pertengahan yang membenarkan resistensi kepada penguasa yang menindas.

Dari gambaran singkat ini, dapatkah kami berkesimpulan bahwa setiap agama menuntut hak mereka pada waktu tertindas dan bersikap tidak peduli lagi ketika mereka berkuasa? Mungkinkah gerakan Reformasi lebih sering mendukung HAM, hanya oleh karena mereka lebih sering tertindas?[11] Tidak sesederhana itu. Memang, perjuangan untuk tetap bertahan mendorong dan memberi inspirasi kepada gerakan Reformasi. Tetapi ada aliran Reformasi yang membangun baik praktek-praktek, maupun teologi sosial, yang menjadi dasar kuat untuk struktur pemerintahan yang mendukung HAM.

Aliran Pietis: Kewajiban dan Otonomi Bidang Ciptaan

Gerakan Reformasi Gereja bisa dibagi tiga.[12] Yang pertama dapat disebut Pietis. Mereka dengan sangat kuat menekankan dosa manusia dan kedaulatan Allah sampai tidak mungkin manusia bisa menuntut hak asasinya. Manusia semua jahat dan di bawah hukuman Allah. Yang berdosa hanya bisa diselamatkan lewat salib Yesus. Semua manusia layak disiksa di neraka, kecuali ada kasih dan anugerah Tuhan yang tidak masuk akal. Akan tetapi, Pietis ini, yang dipengaruhi baik oleh John Calvin maupun Martin Luther, juga percaya bahwa dunia sekular dibagikan oleh Tuhan ke dalam bidang otonom sejak ciptaan (orders of creation). Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk kerja dalam bidang tertentu tanpa diganggu dari bidang lain. Walaupun di depan Tuhan tidak ada HAM oleh karena dosa, namun manusia bertanggung jawab kerja keras di dunia ini sebagai jawaban atas panggilan dari Tuhan.

Konsep ini membentuk semacam tempat sosial untuk perlindungan manusia dari penindasan. Manusia seharusnya dilindungi, bukan oleh karena hak asasinya atau martabatnya, tetapi oleh karena dia wajib bekerja, berdoa, dan melayani sesama demi Kerajaan Allah. Kalau seseorang diutus Tuhan untuk bekerja dan dia tertindas, itu tidak apa-apa bagi orang itu secara pribadi, tetapi pekerjaan Allah dan hormat Tuhan terhina. Oleh karena itu, kaum Pietis tidak takut mengorganisasikan dirinya dalam bidang masing-masing supaya otonomi bidangnya dijaga. Yang penting bukan Hak manusia tetapi Kewajiban manusia. Namun, hasil dari tekanan terhadap Kewajiban dalam kalangan Pietis hampir sama dengan HAM yaitu martabat manusia dihormati dan kewenangan pemerintah atas warga negara dibatasi.

Perbedaan bahasa cukup menarik. Kalau hak asasi individual diutamakan, ada kecenderungan individualis yang cukup menonjol dalam

pikiran Liberal Barat. Mungkinkah konsep *kewajiban* manusia menyeimbangi konsep *hak* sebagai dasar perlindungan manusia? Pasti konsep kewajiban yang dilaksanakan dalam bidang yang otonom dari bidang lain cukup sesuai dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam filsafat negara Republik Indonesia, kebaikan bersama (*Common Good*), selalu ditempatkan di atas hak individu, tetapi setiap warga bertanggung jawab memainkan peranannya. Kalau kewajiban lebih penting daripada hak, kerja keras tanpa pamrih lebih mungkin, tetapi perlindungan bagi orang lemah makin sulit.

Kalvinis Imperialis: Takdir dan Stabilitas

Aliran kedua dari reformasi bisa disebut Kalvinis Imperialis. Kaum konservatif ini percaya bahwa Tuhan sudah menentukan semua yang terjadi dan struktur kekuasaan yang ada merupakan kehendak-Nya yang tidak boleh ditawar. Siapa yang akan diselamatkan oleh Kristus sudah ditakdirkan oleh Tuhan bersama dengan siapa yang akan dikirim ke neraka. Oleh karena seluruh struktur sosial ditentukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kaya dan berkuasa dilihat sebagai yang terpilih dan diberkati oleh Tuhan, sedangkan yang tertindas dan menderita dilihat sebagai yang terkutuk. Semua adalah takdir. Tentu saja, kelompok Kalvinis ini percaya bahwa mereka terpilih dan ditakdirkan untuk memerintah dan menguasai yang lain.

Aliran ini bisa dengan gampang membenarkan penjajahan Indonesia oleh Belanda. Kekuasaan Belanda atas Indonesia pada diri sendiri membuktikan bahwa itulah kehendak Tuhan. Kalvinis Imperialis cenderung dogmatis, etnocentris/rasis, dan legalistis. Aliran Kalvinis ini yang menguasai dunia berabad-abad sampai yang terakhir jatuhnya Afrika Selatan baru beberapa tahun yang lalu. Mengapa mereka begitu lama berkuasa? Menurut pendapat saya, mungkin mentalitas yang muncul dari teologi dan praktek mereka agak mirip teologi dan praktek Orde Baru dan ABRI, yang juga bertahan lama.[13]

Mereka paling mengerti bahwa tidak ada kemajuan tanpa keamanan, stabilitas, dan disiplin. Demi stabilitas nasional, harus peraturan ketat dan struktur kekuasaan hierarkis. Menurut mereka, kebebasan manusia paling sejati, termasuk hak asasi manusia yang paling berharga, hanya bisa dihayati lewat hukum dan disiplin. Tidak ada hak gratis kecuali hak-hak yang muncul dalam konteks orde yang bertanggung jawab. Hasil dari kerja keras, disiplin, dan kesetiaan adalah kekayaan, kewenangan, dan kekuasaan yang merupakan kehendak Allah. Pertanyaan dari cerita tentang Kalvinis Imperial adalah, dalam perjuangan

untuk HAM di Indonesia, apakah mungkin stabilitas struktural bisa dilestarikan? Apakah ada "tempat sosial" (sosial space) dalam kenyataan politik Indonesia, di mana keamanan dan kebebasan bisa berjodoh supaya HAM dihormati?

Puritan dan Gereja Bebas: Paguyuban Perjanjian dan Praktek Demokrasi

Sudah cukup dibuktikan bahwa orang tua dari Demokrasi dan Hak Asasi Manusia modern Barat adalah aliran ketiga dari Reformasi Gereja, yaitu, revolusi Puritan dan Gereja radikal bebas.[14] Pengaruh mereka tidak terutama dari ide-ide yang baru, tetapi bahwa mereka luar biasa berani menentang kekuasaan yang ada dan membentuk komunitas atau paguyuban baru yang diatur secara demokratis berdasarkan kebebasan suci setiap warga. Mereka lebih banyak berasal dari kelas bawah dan berani menentang seluruh struktur sosial bangsawan oleh karena mereka yakin dipanggil Tuhan untuk membentuk paguyuban perjanjian (covenant community), sesuai dengan ajaran Alkitab. Menurut R. H. Tawney, demokrasi lebih berhutang kepada gereja radikal yang menolak gereja resmi daripada semua gerakan lain.[15]

Dalam hal ini, aliran radikal seperti Puritan, Anabaptis, Independen, Diggers, dan Quakers, yang tidak hanya menentang Gereja bangsawan Inggris, tetapi juga Gereja Kalvinis Imperialis. Dalam perang saudara Inggris di antara Raja Charles I dan Parlemen (yang dikuasai oleh Gereja Kalvinis Imperialis), kelihatannya Parlemen menang pada tahun 1646 ketika Raja Charles I menyerah. Tetapi ternyata tentara dari Parlemen kebanyakan dari aliran Gereja radikal dan pada bulan Juni 1647, mereka menolak perintah pembubaran dari Parlemen sebelum hak-hak dan kebebasan mereka terjamin. Menurut Nichols, bisa dikatakan bahwa demokrasi modern dilahirkan oleh tentara yang menganut Reformasi Radikal pada bulan Juni 1647![16] Cukup ironis kalau bayi demokrasi dilahirkan oleh orang yang membawa senjata dan tidak mau pulang kecuali HAM mereka terjamin.

Soalnya, mereka sudah mempunyai pengalaman nyata tentang demokrasi dan HAM melalui jemaat-jemaat Gereja mereka yang independen dan memerintahkan diri sendiri. Mereka menghayati secara radikal ajaran bahwa setiap orang beriman menjadi imam sendiri (priesthood of all believers). Setiap warga Gereja, termasuk yang paling jelek atau miskin, punya hak bersuara. Setiap warga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Setiap orang beriman bisa memberi sesuatu yang berharga kepada Gereja. Itu

berarti mereka sudah mengalami hak-hak demokratis mereka setiap hari dalam praktek Gereja.[17] Dari praktek musyawarah mereka yakin bahwa hidup demokratis berarti berdiskusi terus untuk mencari kebenaran sejati bersama.

Dasar Gereja menurut mereka adalah paguyuban sukarela yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan perjanjian anugerah. Konsep paguyuban perjanjian (covenant community), tidak sama seperti kontrak sosial yang berasal dari Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau. Komunitas perjanjian tidak diciptakan oleh manusia untuk keamanan atau kepentingan individual sendiri. Paguyuban perjanjian adalah buah dari anugerah Allah yang berjanji akan selalu bersama Gereja tersebut selama warganya setia kepada panggilannya untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Yang diciptakan oleh Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kekuasaan apa pun. Seperti dengan aliran pietis, kewajiban lebih penting daripada hak, namun, hak-hak asasi manusia menjadi alat untuk menjaga kebebasan mereka supaya bisa memuliakan nama Tuhan sesuai dengan hati nurani mereka. Mereka percaya bahwa mereka mempunyai hak, baik dari Allah maupun dari alam. Tetapi hak-hak tersebut bukan demi kepentingan atau harga diri mereka sendiri, melainkan demi tugas mereka dan kewajiban mereka dalam dunia ini.

Penganut Puritan dan Gereja radikal lain yang tertindas selama di Inggris, banyak dari mereka melarikan diri ke Amerika. Di sana mereka yakin bahwa semua institusi dalam masyarakat bisa ikut pola demokratis seperti Gereja. Dasarnya adalah kebebasan agama. Tetapi setiap bidang atau bagian dari masyarakat seharusnya mempunyai tempat sosial sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah. Hak asasi manusia, terutama berarti, menurut mereka, kebebasan untuk ikut paguyuban sukarela yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat, tetapi tidak dikuasai oleh pemerintah. Dasar HAM adalah masyarakat sipil yang bisa menjaga tempat-tempat bebas dari campur tangan penguasa.

Konsep itu yang menjadi dasar untuk kebanyakan institusi modern, misalnya, pemerintahan kota yang independen, universitas yang bebas, rumah sakit swasta, sekolah swasta, koperasi, perusahaan, serikat buruh, pers, yayasan, asosiasi cendikiawan serta seribu satu institusi lain yang menuntut hak yang sama seperti hak Gereja Puritan dan Gereja bebas radikal. Menurut pendapat Stackhouse, dalam abad 19 dan 20, model dari teologi dan praktis paguyuban perjanjian menjadi dasar gerakan massa yang melawan perbudakan, memperjuangkan hak-hak perempuan, perlindungan untuk anak, menjaga hak-hak konsumen (supaya tidak ditipu), dan banyak lain.[18] Institusi keluarga pun dipengaruhi-

nya oleh karena keluarga dirumuskan sebagai jemaat kecil di mana setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.

V. HAM di Indonesia dalam Terang Reformasi Gereja

Bagaimana relevansi dari cerita singkat ini, yakni tentang sejarah asal-usul Hak Asasi Manusia untuk masyarakat di Indonesia? Apakah pengalaman orang Puritan dan Gereja Bebas di Eropa dan Amerika relevan bagi kita di sini? Bagaimana kita bisa belajar dari orang jauh dan asing? Menurut pandangan saya, ada delapan hal dari cerita-cerita di atas yang sangat relevan bagi HAM di Indonesia.

1. *HAM sebagai Bahasa Orang Tertindas yang tidak mau Tunduk*

HAM tidak mungkin datang dari atas, dari orang berkuasa atau dari bawah dari orang yang sudah pasrah dengan ketidakadilan. Justru seperti warga jemaat tertindas pada abad 16, yang berani menuntut hak-haknya terhadap raja dan Gereja resmi; HAM muncul dari orang seperti Marsinah dan Udin. Mereka yang berani menentang penguasa tanpa menyerah, kalau perlu, sampai mati. Dari segi itu, kemungkinan untuk membangun HAM di Indonesia baik sekali. Gerakan aktivis, LSM, cendikiawan, dan mahasiswa yang berjuang tanpa lelah sudah membuktikan bahwa isu HAM mempunyai dukungan sangat kuat di Indonesia.

2. *HAM harus Menarik Dukungan dari yang Berkuasa supaya Efektif*

Seperti tentara-tentara dari Gereja bebas yang tidak mau pulang kecuali hak-hak dan kebebasan mereka terjamin, HAM memerlukan dukungan dari kekuasaan. Dukungan itu kadang-kadang harus dipaksakan. HAM di Indonesia tidak mungkin akan dijaga kecuali ada dukungan dari ABRI. Dan ABRI kurang mungkin menjaga HAM kecuali tentara tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan sipil. Secara struktural dan nyata, ABRI seharusnya dikendalikan oleh masyarakat sipil. Tanpa itu, yang seharusnya menjaga HAM bisa menjadi pelanggar HAM yang paling besar.

3. *HAM di Tingkat Nasional Seharusnya Diwujudkan dulu di Lingkungan Lokal*

Kita jangan mengharapkan Komisi HAM bisa menjaga HAM dari Jakarta kalau belum ada pengalaman hidup demokratis yang menghargai kesetaraan setiap orang di lingkungan lokal. Kalau kita praktek demokrasi dan HAM dalam keluarga dengan hubungan suami-istri-anak

dan pembantu yang saling menghormati hak-hak manusia setiap anggota, itu akan menpengaruhi institusi lain. Seperti jemaat Puritan yang mau mendengar pendapat orang paling miskin, kita akan membangun institusi-institusi dalam kampung, pesantren, LSM, universitas, partai politk, Gereja, dan lain lain yang menjujung tinggi martabat dan hak setiap warga. Hanya kalau kita melatih HAM dalam hidup sehari-hari, kita akan mampu membangun negara di mana HAM dihormati. Lewat latihan sehari-hari, HAM akan ditanam sebagai kebiasaan hati setiap warga negara.

4. *Demokrasi sendiri tidak bisa Melindungi Minoritas dari Mayoritas yang Intoleran*

Untuk menghindari pengalaman pahit, seperti Huguenots tahun 1572, PKI tahun 1965-1967 atau Tionghoa bulan Mei 1998, kita memerlukan konstitusi yang kuat dan jelas melindungi hak-hak setiap warga. Lebih dari itu, harus ada pemerintah, institusi hukum dan kepolisian yang cukup kuat supaya mampu melindungi setiap minoritas lemah dari mayoritas yang kuat. Di Eropa, banyak dari gerakan reformasi radikal harus melarikan diri ke Amerika di mana mereka bisa membangun institusi baru yang bebas. Kalau akhirnya minoritas-minoritas di Indonesia harus lari atau pisah dari Republik Indonesia, kerugian kepada Indonesia akan menjadi bencana paling besar dalam sejarah negara tercinta ini. Untuk menghindari bencana seperti itu, yang melanggar HAM harus dihukum secara terbuka dan adil.

5. *Toleransi lewat Dialog, Wacana dan Perdebatan menjadi dasar HAM*

Puritan-puritan dan warga sekte radikal protestan suka berdebat. Tradisi reformasi radikal termasuk musyawarah untuk mencari mufakat. Tetapi sering kali perbedaan pendapat tidak bisa diatasi oleh karena memang orang punya pandangan berbeda. Toleransi lewat dan di tengah berdiskusi menjadi ciri khas demokrasi. Praktek yang dilatihkan dalam jemaat menjadi kebiasaan politik juga. Di Indonesia tradisi musyawarah sudah lama dan kuat, tetapi toleransi terhadap yang tidak bisa setuju dengan mayoritas masih agak lemah. Di Indonesia kemampuan kritis sudah lumayan, tetapi yang dikritik sering menjadi musuh mutlak. Kita perlu belajar kembali bagaimana menjaga hormat dan hak setiap pihak di tengah perdebatan tajam.

6. *Yang mana lebih Cocok untuk HAM di Indonesia: "Kekeluargaan" atau "Paguyuban Perjanjian"?*

Konsep paling penting sebagai dasar HAM menurut gerakan reformasi Puritan dan Radikal adalah "paguyuban Perjanjian". Bagi para filsuf Liberal, kontrak sosial menjadi kunci untuk mengerti hak-hak manusia. Tetapi di Indonesia, metafor yang paling kuat untuk masyarakat adalah "Kekeluargaan." Apakah metafor kekeluargaan mampu mendukung HAM?

Menurut pandangan saya pasti bisa, tetapi agak sulit juga, selama struktur kekeluargaan di Indonesia sangat patriarkis. Hubungan pemerintah dengan masyarakat masih sangat paternalistis seperti hubungan bapak dengan anaknya. Mungkin seorang bapak yang baik bisa menghormati hak-hak anaknya, tetapi jarak kekuasaan di antara mereka terlalu jauh. Kalau bapaknya kurang baik, anaknya sulit dilindungi oleh karena tidak ada kesetaraan. Bagaimana mungkin seorang bapak bisa dipecat atau dihukum oleh anaknya?

Menurut saya ada dua kemungkinan. a.) Bahasa kekeluargaan diganti dengan bahasa perjanjian (Covenant) atau paguyuban atau federasi. Mungkin ikatan di antara suku-suku dan bangsa-bangsa Indonesia kurang kuat untuk diceritakan sebagai kekeluargaan. Kemunafikan bahasa kekeluargaan, khususnya di luar Jawa. b.) Metafor "kekeluargaan" tetap dipakai, tetapi yang ditekankan adalah persaudaraan daripada bapakisme. Mungkin kepala negara lebih baik disebut Bung atau Mbak daripada Bapak. Hubungan pemerintah dan rakyat lebih seperti kakak-adik daripada bapak-anak.

7. *Konsep Hak harus Diimbangi dengan Konsep Kewajiban*

Cerita tentang perjuangan Puritan demi kebebasan demokratis membuktikan bahwa HAM tidak perlu berdasarkan egoisme individual atau kontrak sosial sekular, tetapi bisa mengandung konsep kewajiban kita bersama dalam konteks kesetiaan terhadap perjanjian bersama menghadapi Tuhan. Setiap pribadi dilindungi hak-haknya, bukan terutama demi kepentingan individu, tetapi demi kewajiban setiap orang untuk hidup sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagian dari perjanjian bangsa Indonesia kepada Tuhan adalah untuk menjaga kebhinekaan dalam konteks ketunggalikaan. Bahasa hak-hak masih bisa dipakai, tetapi hak-hak punya referensi kepada nilai lebih mulia daripada kesenangan atau kebebasan individu. Setiap warga negara Indonesia dituntut mencari tahu, dia dapat hak-hak sebagai warga negara demi tujuan apa? Kewajiban apa menjadi dasar haknya?

8. *Etika Tipis tentang HAM bisa Menyatukan Unsur-unsur Masyarakat yang Sangat Beraneka Ragam*

Di Eropa dan Amerika, abad 16-18 ada banyak suku, agama, etnisitas dan kelompok lain yang sangat beraneka ragam tetapi mereka akhirnya setuju untuk menjaga HAM masing masing. Etika tipis tentang HAM akhirnya bisa menyatukan seluruh dunia lewat U.N. Universal Deklarasi tentang HAM. Apalagi, di Indonesia, seharusnya etika tipis tentang HAM bisa menyatukan seluruh tubuh bangsa Indonesia. Walaupun seorang kristen di Irian mungkin tidak setuju dengan seorang Muslim di Aceh tentang makna atau kewajiban hidup, mungkin mereka bisa setuju bahwa hak-hak masing-masing kepada hidup aman sebaiknya dilindungi. HAM tipis bukan dasar etika tebal mereka, tetapi merupakan semacam minim yang bisa menyatukan mereka supaya berjuang bersama melawan penindasan.

Kalau kedelapan hal yang disebut di atas ini sudah menjadi kenyataan di Indonesia, mungkin si Ayam akan menjadi berani turun dari tumpukan beras dan ngobrol bersama Bung Harimau. Dan memang itulah visi Kerajaan Allah menurut nabi Yesaya:

"Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu .... Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya." (Yes 11:6-9).

CATATAN

1 Cerita ini asli dari Afrika, tetapi banyak diubah supaya cocok dengan topik artikel ini dan situasi di Indonesia. Yang asli dari Minnie Postma, *Tales from the Basotho,* Austin, Tx., University of Texas, 1964. Diambil dari David W. Augsburger, *Conflict Mediation Across Cultures,* Louisville, KY, Westminister/ John Knox, 1992), hlm. 1-3.

2 Bandingkan Robert N. Bellah, et. al., *Habits of the Heart,* Berkeley, University of California, 1985.

3 Michael Walzer, *Thick and Thin: Moral Arguments at Home and Abroad,* Notre Dame: University of Notre Dame, 1994. Lihat juga Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality,* New York: Basic Books, 1983.

4 Lihat Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, New York: Random House, 1973.

5 *Lingua franca* yang seperti bahasa pedagang yang biasanya sangat sederhana dan tidak mampu menceritakan cerita-cerita dari budaya tertentu seperti bahasa ibu. Lihat Michael L. Westmoreland-White, "Setting the Record Straight: Christian Faith, Human Rights and the Enlightenment", *The Annual: Society of Christian Ethics* (1995) hlm. 86-90.

6 Lihat Max Stackhouse, *Creeds, Society and Human Rights: A Study in Three Cultures,* Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1984, hlm. 7-8. Tentang kebutuhan biologis manusia, Stackhouse menulis, "But that these needs ought to be met; that they should be met as a matter of social duty; and that they should be met for all, whatever the condition of age, strength, health, or status, entail a range of ideas that has been not at all obvious to philosophy, politics, law, natural law theory, or for that matter, the biological sciences themselves."

7 Amos 2:6-7; bandingkan Amos 1-2, di mana pelanggaran HAM diceritakan sebagai penyebab hukum Allah.

8 Gal 3:28; lihat juga Philemon di mana dia memberi perintah bahwa seorang budak harus diterima sebagai saudara.

9 St. Athenagoras, "A Plea for the Christians," *The Ante-Nicene Fathrs* 2 (1956), 129-130. Lihat Westmoreland-White (1995), hlm. 79-80.

10 Lihat James Hastings Nichols, *Democracy and the Churches*, Philadelphia, Westminster Press, 1951, hlm. 18-20.

11 Pertanyaan ini ditarik dari Nichols (1951), hlm. 22.

12 Tipologi ini dipinjam dan dimodifikasikan dari Stackhouse (1984), hlm. 58-65. Sebagai tipologi memang jauh terlalu sederhana dibandingkan kenyataan sejarah. Tipologi tidak mencoba mendiskripsikan kenyataan, tetapi menyederhanakan aspek –aspek tertentu supaya hal yang penting menonjol. Mungkin kebanyakan orang Kristen taat, abad 16-19 tidak masuk satu kategori saja tetapi campur ciri ketiga-tiganya. Namun, mungkin mereka lebih cenderung terhadap salah satu dari ketiga tipe ini.

13 Apakah pemimpin Orde Baru/ABRI belajar sikap ini dari pemerintahan Belanda? Menurut Romo Y. B. Mangunwijaya, cita-cita dan sikap Orba lebih dipelajari dari etika bushido Jepang daripada guru-guru Belanda yang cenderung lebih humanis. Lihat Y. B. Mangunwijaya, "The Indonesia Raya Dream and its Impact on the Concept of Democracy", dlm: *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s*, David Bourchier dan John Legge, Redaktor, Clayton, Monash University, 1994, hlm. 79-87.

14 Penafsiran bahwa Puritan dan Gereja-Gereja Bebas yang paling berpengaruh dalam kejadian institusi demokratis, didukung oleh cukup banyak ahli sejarah, termasuk William Temple, R. H. Tawney, Lord Acton, Christopher Dawson, A. D. Lindsay, A. S. P. Woodhouse, John Hastings Nichols dan Max Stackhouse. Lihat Nichols (1951), hlm. 29-41, dan Stackhouse (1984), hlm. 60-65.

15 R. W. Tawney, *Religion and the Rise of Capitalism*, New York, Mentor, 1963, hlm. 225. ."...democracy owes more to Nonconformity than to any other single movement."

16 Nichols (1951), hlm. 31.

17 Lihat A. D. Lindsay, *The Churches and Democracy,* London, Epworth Press, 1934, hlm. 24. Bandingkan Nichols (1951), hlm. 32.

18 Stackhouse (1984), hlm. 64.